**ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN**

**PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG**

$Nur Khasanah^{1}$,$Nuwun Priyono^{2}$

$$Mahasiswa Akuntansi, Universitas Tidar, Magelang^{1}$$

$$Dosen Akuntansi, Universitas Tidar, Magelang^{2}$$

Nkhasanah297@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini merupakan menganalisa penyerapan anggaran pada satuan kerja pemerintah daerah ( SKPD) di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskritif. Hasil penelitian ini membuktikan rata- rata tingkatan efektifitas serapan anggaran Dinas Pertanian serta Pangan Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar 73, 75% yang mempunyai kriteria kurang efektifitas. Ada program ataupun kegiatan yang tidak terealisasi ialah program fasilitas prasarana, program kapasitas sumber energi aparatur, program pelaksanaan teknologi pertanian/ perkebunan, program pertanian/perkebunan diakibatkan terdapat sebagian kegiatan yang tidak dilaksanakan sebab terdapatnya rasionalisasi anggaran. Sebaliknya tingkatan efisiensi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang telah sangat bagus, dilihat dari tingkatan efisiensi sebesar 27, 73% hingga dikatakan sangat efektif. Apabila semakin besar serapan anggaran, maka semakin maksimal kinerja anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, serta kebalikannya Apabila semakin rendah serapan anggaran, maka semakin rendah juga kinerja anggaran di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

**Kata kunci : Penyerapan Anggaran, Efektifitas, Efisiensi**

**JEL : G0**

1. **PENDAHULUAN**

Dalam suatu Pemerintah Daerah atau instansi anggaran sangat penting, karena anggaran digunakan untuk menjalankan program kerja atau kegiatan yang direncanakan oleh instansi tersebut. Setiap instansi dituntut untuk transparasi dan akuntabilitas dalam menggunakan anggaran agar terciptanya good governance, maka diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan anggaran.

Lembaga ataupun Pemerintahan berupaya sekeras mencapai tujuan yang telah direncanakan, baik itu tujuan dalam jangka pendek ataupun tujuan dalam jangka panjang. Dalam kegiatan di suatu Lembaga, seluruh bagian ataupun bidang semacam keuangan, administrasi, tata usaha, perencanaan serta lain- lain hendak jadi satuan kerja untuk menunjang tercapainya sesuatu tujuan hingga setiap Lembaga ataupun Pemerintah Wilayah wajib menyusun strategi- strategi dengan metode tingkatkan efektifitas serta efisiensi kerjanya. (Julita, 2014)

 Menurut (Syakhroza, 2008) dalam Undang- Undang Dasar tentang Keuangan Negeri, sudah ditetapkan dalam menyusun anggaran keuangan pemerintah wajib didasarkan pada pendekatan kinerja dengan menitikberatkan pada terciptanya efisiensi serta efiktivitas rencana kerja serta anggaran pada setiap lembaga. Menurut (Mahmudi, 2007) efektivitas ialah desakan antara pengeluaran anggaran dengan tujuan ataupun target yang wajib diraih, sebaliknya efisiensi berkaitan dengan ikatan antara output yang berbentuk pelayanan yang dihasilkan buat menciptakan output. Efisien dan efektivitas sebagai alat ukur untuk membandingkan kinerja instansi.

Tercapainya sasaran kerja yang diukur dari alokasi serta penerapan belanja pada Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah, yang nantinya bisa digunakan sebagai sarana pelayanan serta membangun fasilitas prasarana publik, hasilnya bisa dilihat dari seberapa besar kinerja anggarannya ialah tingkatan serapan anggaran, apabila semakin besar tingkatan penyerapan, maka semakin sempurna kinerja anggaran, serta kebalikannya jika semakin rendah tingkatan penyerapan, maka semakin menjadi rendah pula kinerja anggaran sesuatu pemerintah wilayah, Kecepatan wilayah dalam memakai dananya buat pelayanan kepada warga bisa diarahkan dengan penyerapan belanja APBD, hal- hal tersebut ialah tugas berarti pemerintahan daerah (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2014).

 Pada era globalisasi ini hasil kinerja pemerintah sering menjadi perhatian masyarakat karena Pemerintah Daerah belum menampakan *output* kinerja yang di dapatkan oleh masyarakat. Masyarakat meminta Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik agar bisa mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia masih sering terjadi fenomena rendahnya tingkat penyerapan anggaran baik di tingkat Kementrian, Provinsi maupun Daerah.

 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas menangani pengolaan di bidang pertanian. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten sudah menjalankan 15 program yang terdiri dari 60 kegiatan di tahun 2019, untuk menjalankan program tersebut maka dibutuhkan dana untuk membiayainya.

 Berikut ini merupakan data belanja langsung dan realisasi belanja per program atau kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2019 :

**Tabel 1. Laporan Anggaran Belanja langsung, Belanja langsung dan Realisasi Anggaran tahun 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Target Belanja** | **Serapan Anggaran** |
| **(Rp)**  | **(Rp)**  |
| 1 | Program Administrasi Perkantoran |  470,412,200  |  422,787,645  |
| 2 | Program Peningkatan Sarana Prasarana  |  1,597,771,990  |  1,194,245,806  |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya  |  29,798,050  |  17,648,050  |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |  25,580,000  |  25,417,180  |
| 5 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan |  1,226,972,275  |  1,175,168,793  |
| 6 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan |  294,860,920  |  294,858,000  |
| 7 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa |  41,000,000  |  40,133,345  |
| 8 | Program Pengembangan Media Massa, Informasi dan Komunikasi |   |   |
| 9 | Program Kerjasama Antara Media Massa dan Informasi |   |   |
| 10 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani |  314,892,850  |  288,043,615  |
| 11 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan |  325,806,650  |  309,585,555  |
| 12 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan |  557,500,000  |  408,336,230  |
| 13 | Program Peningkatan produksi Pertanian / Perkebunan |  11,255,824,926  |  7,558,895,340  |
| 14 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan |  609,248,500  |  609,224,295  |
| 15 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  25,208,500  |  24,528,615  |
|   | **Jumlah** |  **16,774,876,861**  |  **12,368,872,469**  |
|  |  |  |  |
| NO | Belanja Tidak Langsung | Target Anggaran | Realisasi Anggaran |
| 1 | Belanja gaji dan tunjangan pegawai  | 29.354.876.861 | 12.368.872.469 |

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyerapan anggaran pada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Dari issu atau fenomena di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : “**ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG”**

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Anggaran**

Menurut (Munandar, 2007) anggaran adalah rancangan yang berasal dari seluruh kegiatan atau program instansi untuk jangka waktu yang akan datang. Sedangkan pendapat (Mardiasmo, 2009) yaitu proses perencanaan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran digunakan untuk menjalankan satuan kerja instansi dan mengendalikan keuangan dalam satu tahun. Suatu instansi diwajibkan membuat anggaran sebagai pemantauan kinerja keuangan agar mencapai target yang diharapkan.

* 1. **Penyerapan Anggaran**

Kinerja Pemerintah Daerah akan dilihat berdasarkan pencapaian target anggaran, penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis realisasi anggaran dengan target yang dianggarkan(Mardiasmo, 2009).Apabila serapan anggaran lemah dalam memenuhi tujuan, maka telah menyumbat pertumbuhan ekonomi (Carsidiawan, 2009) Dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran dalam satu periode.

**2.3 Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

Belanja langsung ialah pengeluaran yang dianggarakan untuk penerapan program ataupun kegiatan Pemerintah Wilayah, sebaliknya belanja tidak langsung yakni pengeluaran yang tidak berkaitan dengan program- program ataupun kegiatan Pemerintah Wilayah (Muttaqinhasyim’s, 2010). Belanja gaji, belanja subsidi, belanja tak terduga, dan lain sebagainya merupakan jenis-jenis belanja tidak langsung.

**2.4 Efektifitas dan Efisiensi**

 Menurut (Mahmudi, 2007) efisiensi yakni analisa untuk mengukur perkembangan belanja yang bermanfaat mengetahui pertumbuhan ataupun perkembangan belanja. Pengukuran efektif dengan metode menyamakan output yang dihasilkan dengan input.. Suatu kegiatan dapat dikatakan efiseien apabila hasil yang dilakukan tercapai dengan penggunaan sumber daya.

 (Mahmudi, 2007) efektifitas merupakan kaitan antara hasil sudah tercapai serta hasil yang diharapkan, Jadi bisa disimpulkan ikatan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi hasil dalam peraihan target, maka semakin efektif kegiatan tersebut.

1. **METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berupa bahan uraian kata-kata atau kalimat yang tidak bisa dihitung dengan skala numerik . Metode penelitian menurut (Sugiyono, 2010) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dankegunaan tertentu. Metode desktriptif melalui metode kuantitif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif menurut (Suryana, 2010) ialah analisa yang mendeskripsikan suatu informasi yang akan dibuat dalam penelitian.

## 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti melakukan pengumpulan data di Dinas Pertanian dan Pangan yang beralamat di Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkid, Magelang 56551. Penelitian dalam mengumpulkan data dilakukan selama satu bulan pada tanggal 13 Januari samai 13 Febuari 2020.

**3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, peneliti langsung melakukan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

1. Teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data sekunder. Data yang diperoleh yaitu sejarah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2019.
2. Teknik wawancara, dilaksanakan melalui tanya jawab dengan Kasubag Keuangan dan Staff Bendahara Pengeluaran.

**3.4 Metode Analisis Data**

Metode deskriptif yang digunakan yaitu dengan cara menguraikan, menggambarkan dan menganalisis data dengan membuat kesimpulan yang relevan. Analisis dimulai dari mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran. Untuk melihat tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, maka dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektifitas= \frac{Realisasi Anggaran}{Target Anggaran} ×100$$

Tingkat efektifitas juga dilihat dari cara menganalisa laporan realisasi anggaran program atau kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria-kriteria penilaian efektifitas pelaksanaan anggaran ialah, sebagai berikut :

**Tabel 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio efektifitas (%)** | **Kriteria** |
| >100 | Sangat Efektif |
| 90-100 | Efektif |
| 80-90 | Cukup Efektif |
| 60-80 | Kurang Efektif |
| <60 | Tidak efektif |

*Sumber : Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996*

Sedangkan menghitung efisiensi dengan cara membandingkan target anggaran dengan realisasi atau serapan anggaran dengan rumus, sebagai berikut :

$$Efisiensi= \frac{Realisasi anggaran belanja langsung}{Target anggaran} ×100$$

Sedangkan menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria penilaian efeisiensi pelaksanaan anggaran adalah, sebagai berikut :

**Tabel 3. Rasio Efisiensi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio Efisiensi (%)** | **Kriteria** |
| >100 | Tidak Efisien |
| 90-100 | Kurang Efisien |
| 80-90 | Cukup Efisien |
| 60-80 | Efisien |
| <60 | Sangat Efisien |

*Sumber : Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996*

1. **HASIL PENELITIAN**

Dari hasil pelaporan pertanggungjawaban atas penerapan anggaran Dinas Pertanian serta Pangan Kabupaten Magelang bisa dilihat dari besar rendahnya serapan anggaran belanja dalam satu tahun ataupun sasaran anggaran yang sudah ditentukan tidak cocok dengan realisasi anggaran. Berikut ini merupakan beberapa program atau kegiatan yang dianggarkan dalam anggaran belanja langsung di Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2019. Program atau kegiatan tersebut adalah :

1. Program Administrasi Perkantoran memiliki tujuan untuk terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, indikator kinerja programnya cakupan pelayanan administrasi dengan target 100%.
2. Program Fasilitas serta Prasarana Aparatur bertujuan mewujudkan kenaikan fasilitas prasarana, indikator kinerja program cakupan kenaikan fasilitas prasarana dengan sasaran 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, indikator kerja program cakupan pelayanan administrasi PAK dengan target 100%.
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan mempunyai tujuan terwujudnya kenaikan sistem pelaporan capaian kinerja serta keuangan dinas, indikator kinerja programnya cakupan program tersebut dengan sasaran 100%.
5. Program Ketahanan Pangan bertujuan menguatkan ketahanan pangan mengarah kedaulatan pangan dengan target jumlah kebutuhan kalori serta protein terpenuhi warga, indikator kinerja programnya ketersediaan tenaga serta protein perkapita serta penguatan cadangan pangan dengan sasaran E= 1980 kkal P= 51, 3 gram.
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan tujuannya mewujudkan kelembagaan pelaku usaha yang kokoh, dinamis serta mandiri dengan indikator target meningkatnya jumlah kelembagaan yang berperan kerja sama yang baik, indikator kinerja programnya cakupan aktivitas pengembangan lembaga ekonomi desa dengan sasaran 20%.
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa memiliki tujuan umtuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui peran serta dalam pembangunan, sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat, indikator kinerja programnya cakupakan kelompok masyarakat dalam membangun desa dengan target 100%.
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa memiliki tujuan untuk terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media masa dengan indikator sasaran tersedianya data informasi kegiatan pertanian dan ketahanan pangan, indikator kinerja programnya diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media masa dengan target 19 jam per hari.
9. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa memiliki indikator kinerja programnya cakupan kerjasama informasi media massa dengan target 100%.
10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani tercapai dalam meningkatan kesejahteraan petani dengan sasaran meningkatnya pendapatan petani melalui pembinaan yang intensif, indikator kinerja programnya nilai tukar petani dengan target 106,50.
11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan agar terwujudnya penguatan jejaring agribisnis dengan sasaran meningkatnya jejaris agribisnis, indikator kinerja programnya jumlah kerjasama kemitraan antara lembaga petani dengan swasta atau pemerintah dengan target 6 kemitraan.
12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, indikator kinerja programnya cakupan ketersediaan alsintan dengan target 1,80%.
13. Program Peningkatan produksi Pertanian / Perkebunan memiliki tujuan agar terwujudnya peningkatan program yang bermutu, berdaya saing dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya produksi komoditas pertanian/perkebunan, indikator kinerja programnya produktivitas padai atau bahan pangan utama dengan target 60,10 kw/ha.
14. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan memiliki tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaran penyuluhan pertanian dengan sasaran meningkatnya peranan dan pemberdayaan penyuluhan dalam pengembangan pertanian.
15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tujuan agar meningkatkan perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran meningkatnya sistem perencanan pembangunan daerah, indikator kinerja programnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu.

**Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019**

**Tabel 4. Analisis Tingkat Efektifitas Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Per Program atau Kegiatan Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program Ke-** | **Program** | **Target Belanja** | **Realisasi Anggaran** | **Tingkat Efektifitas** | **Kriteria** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **%** |
| 1 | Program Administrasi Perkantoran | 470,412,200 | 422,787,645 | 98,8 | Efektif |
| 2 | Program Peningkatan Sarana Prasarana  | 1,597,771,990 | 1,194,245,806 | 74,7 | Kurang Efektif |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 29,798,050 | 17,648,050 | 59,2 | Tidak Efektif |
| 4 | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 25,580,000 | 25,417,180 | 99,4 | Efektif |
| 5 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 1,226,972,275 | 1,175,168,793 | 95,8 | Efektif |
| 6 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 294,860,920 | 294,858,000 | 100 | Efektif |
| 7 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | 41,000,000 | 40,133,345 | 97,9 | Efektif |
| 8 | Program Pengembangan Media Massa, Informasi dan Komunikasi |  | 0 |  |  |
| 9 | Program Kerjasama Antara Informasi dan Media Massa |  | 0 |  |  |
| 10 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 314,892,850 | 288,043,615 | 91,5 | Efektif |
| 11 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 325,806,650 | 309,585,555 | 95 | Efektif |
| 12 | Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 557,500,000 | 408,336,230 | 73,2 | Kurang Efektif |
| 13 | Program Peningkatan produksi Pertanian / Perkebunan | 11,255,824,926 | 7,558,895,340 | 67,2 | Kurang Efektif |
| 14 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | 609,248,500 | 609,224,295 | 100 | Efektif |
| 15 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 25,208,500 | 24,528,615 | 97,3 | Efektif |
|   | **Jumlah** | **16,774,876,861** | **12,368,872,469** | **73,75** | **Kurang Efektif** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang (data diolah)*

Tabel 3. Dari data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menunjukan jumlah serapan anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang pada tahun 2019 per program sebagai berikut :

* 1. Program 1 jumlah serapan anggaran 98,8% dari total anggaran sebesar Rp 470,412,200 sisa anggaran 1,2% maka dikatakan efektif.
	2. Program 2 jumlah serapan anggaran jumlah serapan anggaran 74,7% dari total anggaran sebesar Rp 1,597,771,990 dengan sisa anggaran 25,3% maka dikatakan kurang efektif.
	3. Program 3 dengan jumlah serapan anggaran 59,2% dari total anggaran sebesar Rp 29,798,050 dengan sisa anggaran 40,8% maka dikatakan tidak efektif.
	4. Program 4 dengan jumlah serapan anggaran 99,4% dari keseluruhan anggaran Rp 25,580,000 dengan seelisih anggaran 0,64% maka dikatakan efektif.
	5. Program 5 dengan jumlah serapan anggaran 95,8% dari total anggaran sebesar Rp 1,226,972,275 dengan sisa anggaran 4,2% maka dikatakan efektif.
	6. Program 6 dengan jumlah serapan anggaran 100% dari total anggaran Rp 294,860,920 dengan sisa anggaran 0 maka dikatakan efektif.
	7. Program 7 dengan jumlah serapan anggaran 97,9% dari keseluruhan anggaran sebesar Rp 41,000,000 dengan sisa anggaran 2,1% maka dikatakan efektif.
	8. Program 10 dengan jumlah serapan anggaran 91,5% dari total anggaran sebesar Rp 314,892,850 dengan sisa anggaran 8,5% maka dikatakan efektif.
	9. Program 11 dengan jumlah serapan anggaran 95% dari total anggaran sebesar Rp 325,806,650 dengan sisa anggaran 5% maka dikatakan efektif.
	10. Program 12 dengan jumlah serapan anggaran 73,2% dari total anggaran sebesar Rp 557,500,000 dengan sisa anggaran 26,8% maka dikatakan kurang efektif.
	11. Program 13 dengan jumlah serapan anggaran 67,2% dari total anggaran sebesar Rp 11,255,824,926 dengan sisa anggaran 32,8% maka dikatakan kurang efektif.
	12. Program 14 dengan jumlah serapan anggaran 100% dari total anggaranRp 609,248,500 maka dikatakan efektifitas.
	13. Program 15 dengan jumlah serapan anggaran 97,3% dari total anggaran sebesar Rp 25,208,500 dengan sisa anggaran 2,7% maka dikatakan efektif dan efisien.

Hasil di atas menunjukan serapan anggaran sebesar 73,75% memiliki kriteria kurang efektifitas atau belum maksimal dalam menjalankan programnya. Hasil tersebut mendukung pendapat (Santoso, 2011) bahwa efektifitas menitikberatkan pada tercapainya tujuan yang ditetapkan. Apabila semakin tinggi serapan anggaran, maka semakin optimal kinerja anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, dan sebaliknya jika semakin rendah serapan anggaran, maka akan menurunkan kinerja anggaran di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Dari pernyataan ini juga mendukung (Saron, 2017) apabila semakin banyak realisasi anggaran, maka semakin tinggi juga tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran.

Teknik wawancara yang dilakukan kepada Ibu Ir. Titik Sri Wulandari selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anik Purnamasari, S.P.,M.MA selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Pertanian dan Pangan. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yaitu bahwa masih terdapat capaian penyerapan anggaran belum mencapai target yang direncanakan atau kurang efektif. Pada program peningkatan sarana prasarana dikatakan kurang efektif karena pada kegiatan PAK(penilaian angka kredit) honor tim penilai berdasarkan DUPAK (daftar urutan penilaian angka kredit) sementara jumlah DUPAK yang masuk tidak sesuai prediksi. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dikatakan tidak efektif disebabkan pada kegiatan pengadaan gedung kantor dan kegiatan penataan kantor untuk pekerjaan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan tidak dilaksanakan karena ada rasionalisasi anggaran. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dikatakan kurang efektif karena pada kegiatan pengembangan anggrek spesies, aplikasi teknologi pasca panen, pengembangan tanaman hias dan pengembangan kerjasama lembaga penyuluh dan penelitian mengalami rasionalisasi anggaran. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dikatakan kurang efektif karena sertifikasi komoditas empon-empon tidak dilaksanakan pengadaan bibit di lapangan dan kegiatan produksi benih unggul , holtikultura dan tanaman pangan hanya dilaksanakn 7 paket dari target 20 paket.

**Analisis Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019**

**Tabel 5. Analisis Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Belanja Tidak Langsung | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi | Kriteria |
| 1 | Belanja gaji dan tunjangan pegawai | 29.354.876.861 | 12.368.872.469 | 27,73% | Sangat Efisien |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang (data diolah)*

Tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sudah sangat baik, dilihat dari tingkat efisiensi sebesar 27,73% maka dikatakan sangat efisien. Hasil penelitian sependapat dengan (Sumenge, 2013) pada tahun 2008-2011 anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan memiliki kriteria sangat efisien, dalam menghitung efisiensi dengan mendayagunakan anggaran belanja seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan total keseluruhan belanja tidak langsung dengan belanja tidak langsung.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 KESIMPULAN**

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa dari program kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menunjukan rata-rata tingkat efektifitas serapan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar 73,75% yang memiliki kriteria kurang efektifitas. Terdapat program atau kegiatan yang tidak terealisasi yaitu program peningkatan sarana prasarana, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sudah sangat bagus, dilihat dari tingkat efisiensi sebesar 27,73% maka dikatakan sangat efisien.

**5.2 SARAN**

1. Untuk Pemerintah Daerah diharapkan selalu memantau benih bersertifikat dan harga satuan bibit di lapangan agar memperlancar pengadaan bibit. Di perlukan penyempurnaan rincian belanja pada masing-masing kode rekening belanja.
2. Bisa dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya menggunakan lebih banyak data dan menambah tahun penelitian.

 **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puja dan puji Syukur atas Karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan diberikan kelancaran dan kemudahan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung dan membantu penelitian ini :

1. Bapak, Ibu dan Kakak yang selalu menyemangati dan memotivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Ir. Titik Sri Wulandari selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anik Purnamasari, S.P.,M.MA yang telah membantu menyusun penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**ARTIKEL :**

Julita. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Santoso, E. (2011). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. *Tesis Master Program Pasjasarjana, UNS*, 1–75. digilib.uns.ac.id

Saron, Y. (2017). Analisa Efektifitas dan Efisiensi Pelaksana Anggaran Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Politeknik Negeri Padang*.

Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perenanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Syakhroza. (2008). Telaah Governance Sistem Keuangan Negara. *Jurnal Usahawan*, 37–40.

**BUKU :**

Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.

Munandar. (2007). *Budgeting,Perencanaan kerja, Pengkoordinasian kerja, Pengawasan kerja*. BPFE UGM.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Suryana. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. UPI.

**WEBSITE**

Carsidiawan. (2009). *Mengungkapkan Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah*. http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/24/29/mengungkappenyebab-lambatnyapenyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/

Dirjen Perimbangan Keuangan. (2014). *Laporan Realisasi Anggaran*. www.djpk.go.id

Muttaqinhasyim’s. (2010). *Skripsi (Tugas Akhir) Anggaran Belanja Tidak Langsung (Budget Accounting)*. https://muttaqinhasyim.wordpress.com